

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001 (Setiyawati dan Hamzah, 2007:212). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui otonomi daerah, pembangunan daerah yang dilakukan oleh masyarakat lokal dipandang merupakan strategi atau cara yang paling efektif dibandingkan strategi pembangunan yang bersifat sentralistis yang dilakukan pusat (Saragih, 2003:27). Strategi atau cara yang paling efektif untuk pemerataan pembangunan daerah terletak pada pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga pengelolaan keuangan

daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan potensi daerah.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesa, 1995, dalam Halim, 2007:23). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip taat pemerintahan yang baik (*good government governance*) (Halim, 2007:24). Dengan adanya prinsip *value for money* dan *good government governance* diharapkan dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Teori *fiscal federalism* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai pada desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah, dimana dalam teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Menurut Penthury dalam Ani dan Dwirandra (2014:482) menyatakan bahwa pemerintah daerah harus

mampu memberikan fasilitas pelayanan publik dengan baik untuk seluruh masyarakat lokal, karena infrastruktur adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya keuangan daerah yang merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada hakikatnya APBD sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Artinya dengan adanya APBD paling tidak pemerintah daerah dapat mempengaruhi seluruh kegiatan perekonomian daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang berlangsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya

untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak (Halim, 2012). Salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada APBD yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan. Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas belanja di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002:9).

Berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pasal 39 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah dapat digunakan tolak ukur untuk (Halim, 2012:L-3):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Mengukur aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga digunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengeluaran daerah yaitu *value for money* dimana anggaran yang berbasis kinerja adanya output optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi ekonomis, efisien, dan efektif.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah (terutama pemerintah pusat dan provinsi) dan demikian pula sebaliknya. Dengan tingginya rasio kemandirian maka menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan PAD terhadap target PAD maka

semakin efektif. Semakin tinggi rasio efektifitas maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi belanja daerah. Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin efisien dan demikian sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD belum ada patokan yang ideal, karena dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas adalah sebagai kinerja pelaksanaan APBD yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana

Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Aspek belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Selanjutnya, aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Sisi penerimaan daerah, semakin membaiknya perekonomian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan potensi penerimaan daerah Jawa Timur yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menggali, mengelolah dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimiliki sesuai kebutuhan masyarakat supaya tidak terjadi defisit fiskal. Oleh karena itu, diperlukannya masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah tetapi, juga diperlukan dukungan dari segi kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih intensif, wajar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan daerah selain diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah juga diperoleh dari Dana Perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah. Adanya peran pemerintah dalam menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber penerimaan daerah akan menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan masyarakat daerah.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap tingginya penerimaan bantuan dari pusat dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membawa konsekuensi rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Jadi rendahnya kemampuan pemerintah daerah ditunjukkan dengan

besarnya transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah yang rendah. Besarnya transfer dana perimbangan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya sehingga untuk mengetahui kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diperoleh tiap masing-masing kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tercantum pada lampiran 7 halaman 132 dan lampiran 9 halaman 134.

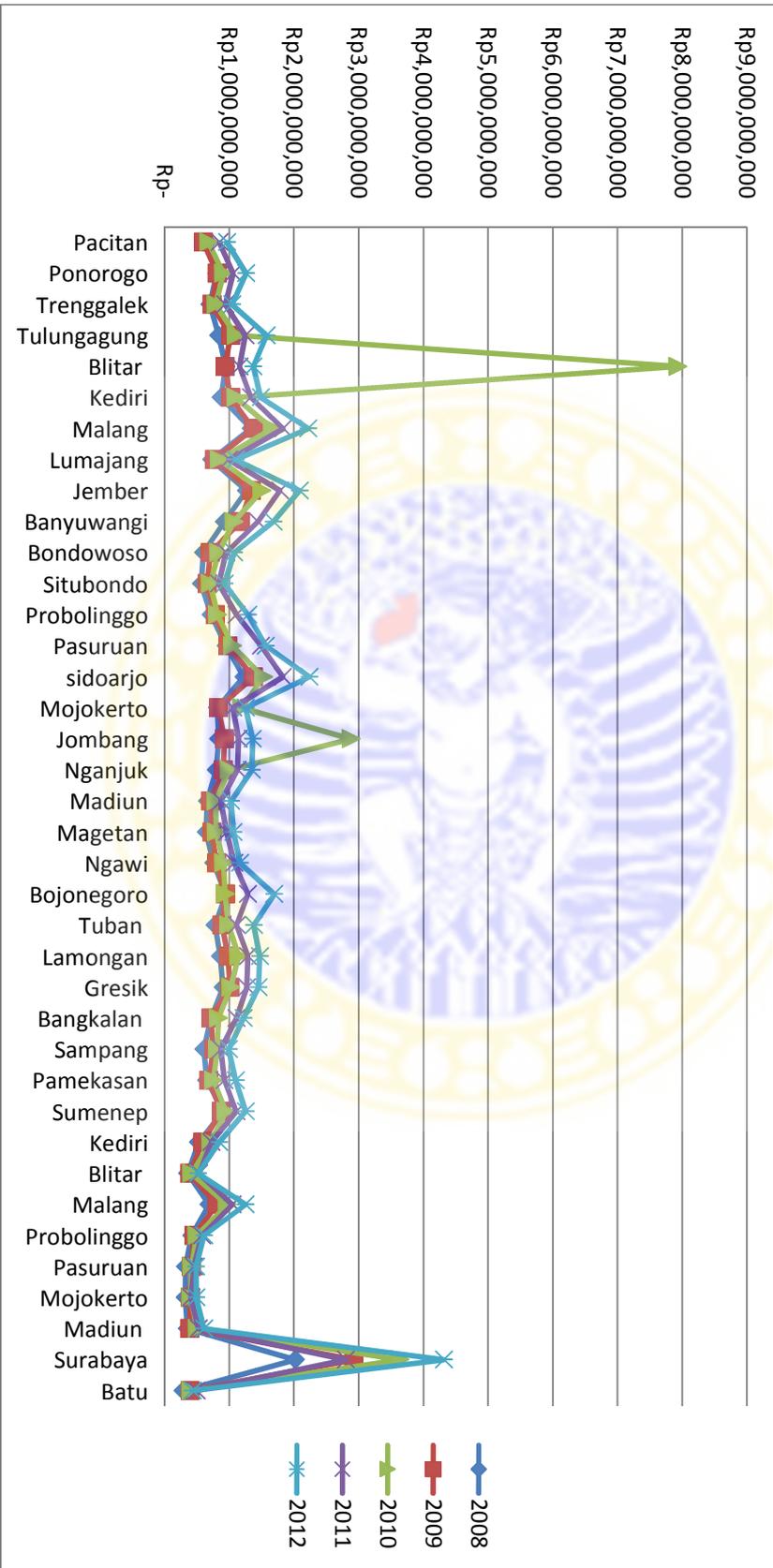
Berdasarkan data PAD di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur (lampiran 7 halaman 132), nilai absolutnya dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2008 kabupaten/kota yang mengalami penerimaan PAD terbesar adalah Kota Surabaya dengan nilai sebesar Rp 729.213.319 ribu, sedangkan yang paling kecil adalah Kabupaten Batu yaitu sebesar Rp 16.8766.710 ribu. Pada tahun 2012 pendapatan asli daerah terbesar di Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya sebesar Rp 2.280.003.560 ribu, diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 669.617.557 ribu dan Kabupaten Gresik sebesar Rp 427.588.706 ribu. Adapun penerimaan PAD yang paling kecil tahun 2012 adalah Kota Batu sebesar Rp 38.794.059 ribu. Semakin besar PAD yang diperoleh di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur menunjukkan semakin besar kemampuan keuangan daerah dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perlu diketahui pula besarnya transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (dana perimbangan) merupakan komponen untuk mengetahui kemampuan

keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berupa rasio kemandirian keuangan daerah. Pada lampiran 9 (halaman 134) menunjukkan besarnya dana perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008 sampai dengan 2012.

Berdasarkan lampiran 9 (halaman 134) selama periode 2008 sampai dengan 2012 yang tercantum pada laporan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), total dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara absolut mengalami peningkatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Pada tahun 2008 bantuan dari pemerintah pusat terbesar di terima oleh Kota Surabaya sebesar Rp 1.289.211.531 ribu, sedangkan yang paling kecil transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat adalah Kota Mojokerto sebesar Rp 276.662.006 ribu. Besar kecilnya transfer yang diterima dari pemerintahan pusat menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut masih ketergantungan dari transfer pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah. Peningkatan transfer dari pemerintah pusat juga diikuti oleh peningkatan pengeluaran daerah (belanja daerah) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Sisi pengeluaran daerah (belanja daerah), kondisi ekonomi kabupaten/kota Jawa Timur akan menambah arah intervensi pemerintah daerah terhadap sektor-sektor sosial dan ekonomi yang menjadi target pembangunan yang ingin dicapai. Belanja daerah kabupaten/kota Jawa Timur pada setiap tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut tercantum pada Gambar 1.1 (halaman 10).

Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2012 (Milyar Rupiah)

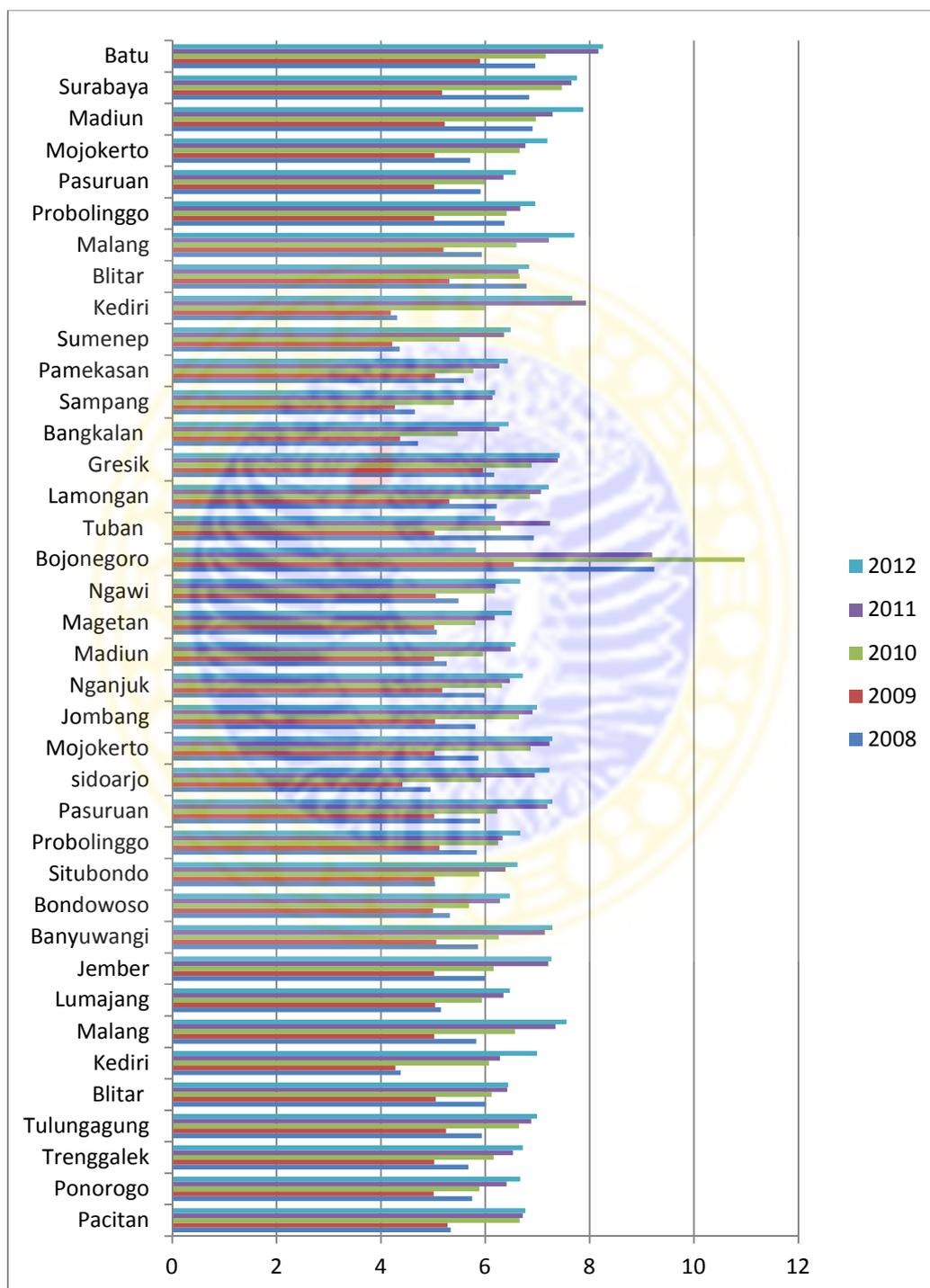


Sumber: BPS, 2009b-2013b

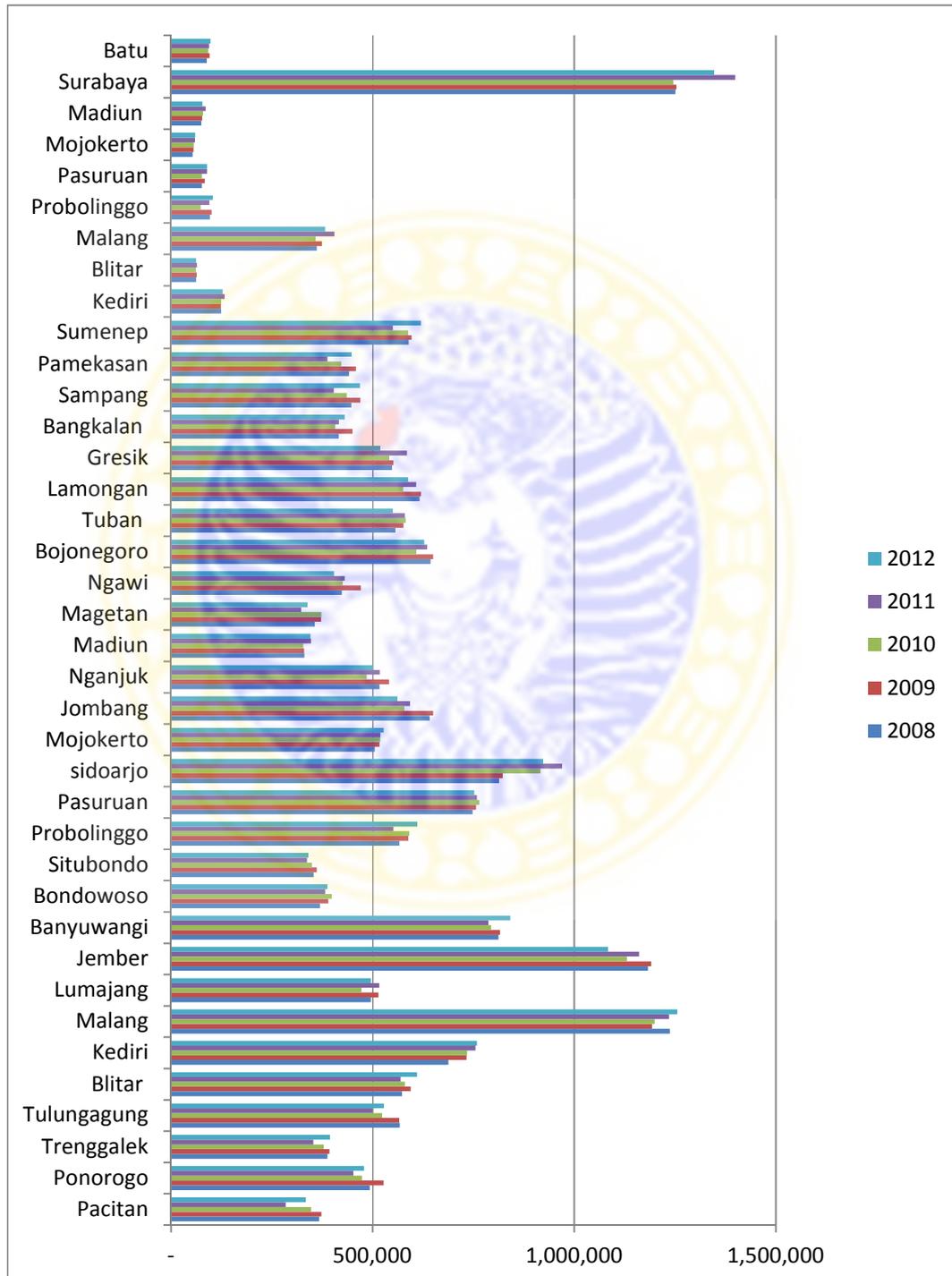
Gambar 1.1

Berdasarkan data yang diolah menjadi Gambar 1.1 (halaman 10), belanja daerah kabupaten/kota Jawa Timur pada tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan belanja daerah yang sangat tinggi, terlihat antara Kabupaten Tulungagung, Blitar, dan Kediri. Belanja daerah tertinggi pada tahun 2008 sampai dengan 2012 terjadi pada Kota Surabaya dan belanja daerah terendah terjadi pada Kota Mojokerto. Belanja daerah di setiap Kabupaten/Kota Jawa Timur yang semakin meningkat setiap tahunnya akan berdampak pada kondisi makro ekonomi. Menurut Musgrave (1959) dan Oates (1972) keterkaitan yang erat antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi daerah.

Dampak pengeluaran pemerintah terhadap kondisi makro ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan pemerataan hasil pembangunan daerah (Sasana, 2009:51). Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan selama tahun 2009-2012, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008-2009 mengalami penurunan sebesar 0,93 persen yang pada tahun 2008 sebesar 5,94 persen menjadi 5,01 persen. Tetapi pada setiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur sangat bervariasi. Laju pertumbuhan ekonomi yang paling tertinggi pada Kabupaten Bojonegoro tahun 2010 sebesar 10,97 persen. Laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kota Kediri pada tahun 2009 sebesar 4,28 persen. Laju pertumbuhan pada setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tercantum pada Gambar 1.2 (halaman 12).

Gambar 1.2**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2012 (persen)**

Sumber: BPS, 2013c

Gambar 1.3**Tenaga Kerja Terserap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 (jiwa)**

Sumber: BPS, 2009a-2013a

Menurut Todaro (2003:92) ada faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, kedua dapat dilihat dari ketanggakerjaan, terjadi ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia sehingga menimbulkan masalah pengangguran. Hal tersebut terjadi karena rendahnya tenaga kerja yang terserap pada suatu daerah. Tenaga kerja yang terserap pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berdasarkan orang yang bekerja terlihat pada Gambar 1.3 (halaman 13).

Berdasarkan Gambar 1.3 (halaman 13) banyaknya rata-rata tenaga kerja terserap pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang tertinggi selama tahun 2008-2012 adalah Kota Surabaya yang berjumlah 2.598.370 jiwa. Tenaga kerja terserap paling rendah pada Kabupaten/Kota Jawa Timur adalah Kabupaten Mojokerto sejumlah 113.794 jiwa. Rendahnya tenaga kerja yang terserap disebabkan salah satunya oleh buruknya kinerja pengelolaan anggaran daerah. Kenyataan tersebut dapat kita ketahui dari makin sedikitnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemriksa Keuangan (BPK).

Menurut Media Indonesia dalam artikel Rohman (2010), tahun 2009 jumlahnya hanya delapan daerah dari 164 LKPD yang dilaporkan. Padahal, pada 2004 lalu jumlah laporan keuangan daerah yang mendapatkan opini terbaik berjumlah 21 buah. Pada 2005 turun menjadi 17 daerah, bahkan sejak 2006 merosot tajam menjadi kurang dari 10 daerah. Hal tersebut merupakan

dampak adanya krisis keuangan global Amerika Serikat (AS) tahun 2008/2009 yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian tentang kinerja keuangan sebagai penilaian kinerja pemerintah daerah yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Ani dan Dwirandra (2014) mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kota Provinsi Bali menggunakan rasio keuangan yakni rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Hamzah (2009) menggunakan rasio keuangan yakni rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Hidayat (2013) menggunakan tingkat ketergantungan, efektivitas PAD, tingkat pembiayaan silpa, dan rasio ruang fiskal. Sularso dan Restianto (2013) menggunakan derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan derajat kontribusi BUMD. Akan tetapi belum banyak yang melakukan penelitian yang mengaitkan antara kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi secara langsung yang kemudian dilihat dampaknya terhadap tenaga kerja terserap.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan daerah yang berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi serta tenaga kerja terserap. Peneliti memilih variabel tersebut karena dalam kinerja keuangan daerah harus dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian suatu daerah,

mengukur efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerahnya, mengukur aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah. Penggunaan tolak ukur tersebut diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian merangsang peningkatan tenaga kerja terserap. Penelitian dilakukan di Kabupaten/Kota Jawa Timur karena pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Tenaga Kerja Terserap di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur”, pada tahun 2008-2012 menarik untuk diteliti. Penggunaan tahun 2008-2012 karena pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global yang secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio aktivitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012?
2. Apakah rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio aktivitas secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012?

3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tenaga kerja terserap di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis secara bersama-sama pengaruh rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio aktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012.
2. Menguji dan menganalisis secara parsial pengaruh rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio aktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tenaga kerja terserap di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran atau masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan menganalisa kemampuan pemerintah daerah pada era otonomi daerah.
2. Sebagai bahan acuan dan preferensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan otonomi daerah khususnya tentang kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bagian yang saling berhubungan yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini juga akan membahas tentang pengkajian hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta berisi tentang hipotesis dan kerangka konseptual.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum, deskripsi penelitian, analisis data, pembuktian hipotesis dan pembahasan mengenai hasil analisis. Uraian objek penelitian dan analisis penelitian didasarkan pada data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data yang telah diolah oleh penulis.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran yang diajukan sebagai alternatif pemecahan masalah sehingga diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.